JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN INDONESIA
https://indojurnal.com/index.php/jiemi
eISSN 3124-2197 & pISSN 3124-2227
Vol. 2, No. 2, Tahun 2026
doi.org/10.63822/tpvkjd60
Hal. 5446-5459

Analisis Prosedur Verifikasi dan Rekonsiliasi Transaksi Keuangan pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya

Radiana Gayanti[1], Rizqy Mufida[2], Salsabila Khoirunnisa Al Kaafi[3], Choirul Anwar[4]
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia[1,2,3,4]

*Email: radianagayanti8@gmail.com, rizqymufida90@gmail.com, sabilakaafi@gmail.com, choirulanwar@uinsatu.ac.id

Diterima: 06-11-2026 | Disetujui: 13-11-2026 | Diterbitkan: 15-11-2026

ABSTRACT

This research aims to find out how the verification and reconciliation of financial transaction data for the Work Accident Insurance (JKK) Program is applied at PT TASPEN (Persero) Surabaya Branch Office. The research was carried out at Jalan Diponegoro No. 193, Wonokromo, Surabaya, from August 31 to September 30, 2026. The study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including participatory observation and document study. Data sources were obtained from the author's observation notes during the Field Practice Experience (PPL) activities, administrative documents for JKK medical expense claims, as well as information from officers through informal discussions. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that verification is carried out by checking participant identity, work accident information, insurance status, document completeness, and the accuracy of hospital bill details. Meanwhile, reconciliation is carried out by matching information across various documents and transaction evidence to spot any differences in data or amounts. Challenges to watch out for in this process include incomplete documents and mismatched information. Follow-up is done by re-examining the source documents, confirming with relevant parties, and recording the results of the clarification. This study is hoped to serve as evaluation material for the company to strengthen the accuracy of checks and the organization of financial administration in the JKK Program.

Keywords*: reconciliation, verification, financial transactions, Work Accident Insurance, PT TASPEN.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan verifikasi dan rekonsiliasi data transaksi keuangan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Surabaya. Penelitian dilaksanakan di Jalan Diponegoro No. 193, Wonokromo, Surabaya, pada 31 Agustus sampai dengan 30 September 2026. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif dan studi dokumen. Sumber data diperoleh dari catatan pengamatan penulis selama kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), dokumen administrasi pengajuan tagihan biaya perawatan JKK, serta informasi dari petugas melalui diskusi informal. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikasi dilakukan dengan memeriksa identitas peserta, informasi kecelakaan kerja, status penjaminan, kelengkapan dokumen, dan kesesuaian rincian tagihan rumah sakit. Sementara itu, rekonsiliasi dilakukan melalui pencocokan informasi antardokumen dan bukti transaksi untuk mengetahui kemungkinan perbedaan data maupun nominal. Kendala yang perlu diperhatikan dalam proses tersebut meliputi ketidaklengkapan dokumen dan ketidaksesuaian informasi. Tindak lanjut dilakukan melalui pemeriksaan ulang dokumen sumber, konfirmasi kepada pihak terkait, serta pencatatan hasil klarifikasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam memperkuat ketelitian pemeriksaan dan ketertiban administrasi keuangan Program JKK.

Kata kunci: rekonsiliasi, verifikasi, transaksi keuangan, Jaminan Kecelakaan Kerja, PT TASPEN.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Gayanti, R. ., Mufida, R. ., Khoirunnisa Al Kaafi, S. ., & Anwar, C. . (2026). Analisis Prosedur Verifikasi dan Rekonsiliasi Transaksi Keuangan pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Indonesia, 2(2), 5446-5459. https://doi.org/10.63822/tpvkjd60

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pada lembaga penyelenggara jaminan sosial tidak cukup hanya mengandalkan sistem pencatatan yang baik. Dana yang dikelola menyangkut hak peserta, sehingga setiap transaksi harus dapat dijelaskan, ditelusuri, dan dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka itu, kas menempati posisi yang sensitif. Tangkau et al., (2023) menegaskan bahwa kas memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, sehingga memerlukan pengendalian intern yang memadai agar transaksi berjalan tertib, risiko keuangan dapat ditekan, dan laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat. PT TASPEN (Persero) sebagai badan usaha yang melayani Aparatur Sipil Negara menghadapi tuntutan tersebut setiap hari, terutama karena program yang dikelolanya mencakup pembayaran manfaat dengan karakter yang berbeda-beda, salah satunya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Penyelenggaraan JKK bagi ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, yang dikelola oleh TASPEN dengan iuran 0,24% dari gaji peserta yang ditanggung pemberi kerja. TASPEN wajib membayar manfaat paling lama satu hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar serta menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, 2015).

Karakter transaksi JKK berbeda dari pembayaran pensiun yang bersifat berkala. Klaim JKK timbul dari kejadian kecelakaan kerja yang tidak dapat dipastikan waktunya dan nilai manfaatnya bergantung pada kondisi yang dialami peserta. Setiap klaim juga harus melewati beberapa tahap, mulai dari pengajuan, pemeriksaan dokumen, persetujuan, pembayaran, hingga pencatatan. Rangkaian ini membuka peluang munculnya selisih antara data klaim, data pembayaran, dan data yang tercatat dalam sistem keuangan. Jika selisih tersebut tidak segera ditemukan, ketepatan pencatatan dan pelaporan keuangan program JKK ikut terganggu.

Pada PT TASPEN Kantor Cabang Surabaya, proses tersebut telah ditopang sistem digital. Transaksi dicatat menggunakan SAP, pengajuan data peserta dilakukan melalui Taspen Online Service (TOS), dan pencairan dana memanfaatkan aplikasi Enrollment Taspen. (Wijaya & Sukandi, 2019b) menyatakan bahwa SAP membuat pencatatan lebih efektif dibandingkan cara manual. Meski demikian, sistem hanya mengolah apa yang dimasukkan kepadanya. Data yang salah ketik atau tidak sesuai dengan dokumen sumber tetap akan terekam, sehingga ketelitian petugas dan kepatuhan pada prosedur tetap menentukan kualitas hasil akhir.

Untuk menjaga ketepatan data tersebut, rekonsiliasi dan verifikasi berperan sebagai mekanisme pengendalian. Dalam literatur sistem informasi akuntansi, pencocokan catatan dari sumber yang berbeda termasuk aktivitas pengendalian untuk mendeteksi kesalahan. Rekonsiliasi didefinisikan sebagai proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses melalui beberapa sistem berdasarkan dokumen sumber yang sama, untuk mengidentifikasi perbedaan pencatatan yang dapat menurunkan validitas dan akurasi laporan keuangan (Suryaningsih & HB, 2021). Penerapan rekonsiliasi secara sistematis juga terbukti meningkatkan kesesuaian data transaksi antara dua sumber data (Chamalinda & Leapatra, 2026). Namun kualitas pelaksanaannya menentukan hasil. Suryaningsih & HB, (2021) menemukan bahwa kepatuhan rekonsiliasi pada satuan kerja kementerian tidak berpengaruh signifikan terhadap validitas laporan keuangan, dan menduga rekonsiliasi dilakukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban. Temuan ini menegaskan perlunya melihat bagaimana verifikasi dan rekonsiliasi benar-benar dijalankan, bukan hanya

apakah keduanya ada.

Kajian terdahulu pada TASPEN umumnya menyoroti sistem akuntansi dan pengendalian intern. Tasikrede et al. (2018) meneliti sistem akuntansi klaim JKK pada Kantor Cabang Manado dengan fokus pada fungsi terkait, dokumen, catatan akuntansi, dan jaringan prosedur. Wijaya & Sukandi, (2019) meneliti sistem akuntansi pengeluaran kas di Kantor Cabang Surabaya, sementara Tangkau et al. (2023) dan Syafridayani et al. (2025) membahas pengendalian intern dan audit manajemen pada pembayaran pensiun. Selain itu, Suryaningsih & HB, (2021) meneliti tingkat kepatuhan rekonsiliasi pada satuan kerja pemerintah, sedangkan Chamalinda & Leapatra, (2026) menerapkan rekonsiliasi data transaksi menggunakan perangkat lunak akuntansi pada perusahaan klien.

Dari penelitian-penelitian tersebut, penulis menemukan tiga celah. Pertama, dari segi fokus, penelitian di TASPEN lebih banyak membahas sistem dan pengendalian secara umum, sehingga rekonsiliasi dan verifikasi data transaksi belum dikaitkan secara khusus dengan ketepatan pencatatan dan pelaporan keuangan. Kedua, dari segi objek, belum banyak kajian yang menyinggung JKK melaikan mengangkat pengeluaran kas dan pensiun. Ketiga, dari segi konteks, penelitian tentang rekonsiliasi umumnya dilakukan pada instansi pemerintah dan perusahaan umum, bukan pada penyelenggara jaminan sosial, dan hasilnya pun belum seragam mengenai pengaruh rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan. Sejauh yang penulis ketahui, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji rekonsiliasi dan verifikasi data transaksi keuangan program JKK pada tingkat Kantor Cabang Surabaya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menggambarkan penerapan rekonsiliasi dan verifikasi data transaksi keuangan program JKK pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Surabaya, berdasarkan pengamatan selama kegiatan PPL, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menguraikan upaya untuk meningkatkan ketepatan pencatatan dan pelaporan keuangan. Hasilnya diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi kantor cabang dan referensi bagi penelitian sejenis pada lembaga penyelenggara jaminan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah observasi dan praktik langsung dengan teknik pengambilan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini, mengunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengamatan fenomena dengan fakta yang terjadi di lapangan (Pahleviannur et al., 2022). Kegiatan pengumpulan data dilakukan selama Praktik Pengalaman Lapangan di PT TASPEN Kantor Cabang Surabaya yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 193, Wonokromo, Surabaya - 60142. Dilaksanakan dari tanggal 31 Agustus 2026 sampai dengan 30 September 2026.

Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan studi dokumen. Menurut Kristanto (2018), observasi adalah proses memperhatikan fenomena yang terjadi di lapangan untuk memperoleh informasi kontekstual yang berkaitan dengan waktu, proses, dan keadaan yang berlangsung. Pada observasi partisipatif, peneliti mengamati kegiatan orang yang diamati sekaligus ikut terlibat di dalamnya (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, penulis terlibat langsung dalam kegiatan harian pada aktivitas administrasi yang diizinkan untuk dipelajari, sesuai arahan petugas dan ketentuan kerahasiaan perusahaan. Pengamatan diarahkan pada alur kerja, pemeriksaan dokumen, pencocokan informasi antardokumen, serta penggunaan

dokumen pendukung dalam proses administrasi.

Sumber data berupa catatan hasil pengamatan penulis dan dokumen administrasi yang dapat diakses selama PPL. Dokumen yang dianalisis berkaitan dengan pengajuan tagihan biaya perawatan JKK, yaitu formulir permintaan pembayaran, surat jaminan, rincian tagihan, kuitansi, Formulir Taspen-3, dokumen medis pendukung, identitas peserta, dan informasi rekening rumah sakit. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan(Sugiyono, 2019). Pada tahap reduksi, penulis memilah catatan pengamatan dan temuan dokumen yang berkaitan dengan verifikasi dan rekonsiliasi. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif sesuai alur proses, lalu disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan dokumen administrasi yang diperiksa, serta mengonfirmasi pemahaman prosedur kepada petugas melalui diskusi informal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Surabaya

Pengelolaan keuangan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Surabaya berkaitan erat dengan proses penjaminan biaya perawatan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pembayaran tagihan rumah sakit, tetapi juga mencakup pemeriksaan kelayakan penjaminan, pengumpulan dokumen pendukung, verifikasi rincian biaya, serta pencocokan data transaksi sebelum tagihan diproses lebih lanjut. Setiap tahapan tersebut memiliki keterkaitan karena keputusan mengenai penjaminan biaya perawatan menjadi dasar bagi proses administrasi dan pertanggungjawaban keuangan berikutnya.

Secara khusus, pengelolaan keuangan JKK di PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Surabaya diawali dengan penerimaan informasi mengenai peserta yang mengalami kecelakaan kerja. Informasi tersebut dapat diterima melalui sistem yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan maupun melalui laporan manual dari peserta, ahli waris, instansi, atau rumah sakit. Untuk laporan manual, informasi disampaikan dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam melalui layanan yang telah ditentukan. Informasi awal tersebut menjadi dasar bagi TASPEN untuk melakukan koordinasi dan investigasi guna memastikan identitas peserta, kronologi kejadian, serta kesesuaian kasus dengan ketentuan penjaminan JKK.

Hasil investigasi selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan apakah kasus kecelakaan tersebut dapat dijamin oleh TASPEN. Apabila kasus dinyatakan memenuhi ketentuan, TASPEN menerbitkan surat jaminan kepada rumah sakit dengan tembusan kepada BPJS Kesehatan. Sebaliknya, apabila kasus tidak memenuhi ketentuan penjaminan, TASPEN menerbitkan surat tidak menjamin kepada rumah sakit dengan tembusan kepada BPJS Kesehatan. Perbedaan keputusan tersebut berpengaruh terhadap kelanjutan proses administrasi, khususnya dalam menentukan dasar pengajuan dan pemeriksaan tagihan perawatan.

Setelah peserta menyelesaikan perawatan, proses pengelolaan keuangan berlanjut pada pemeriksaan dokumen pengajuan tagihan dari rumah sakit. Dokumen yang diperiksa meliputi formulir permintaan pembayaran, salinan surat jaminan, rincian tagihan, kuitansi asli, Formulir Taspen-3, dokumen medis pendukung, salinan KTP peserta, serta nomor rekening rumah sakit. Kelengkapan dan kesesuaian

dokumen tersebut perlu diperhatikan karena setiap dokumen memiliki fungsi sebagai bukti yang mendukung keabsahan pengajuan biaya perawatan. Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap atau informasi yang tidak sesuai, pemeriksaan lebih lanjut diperlukan agar proses administrasi tidak hanya didasarkan pada kelengkapan berkas secara formal, tetapi juga pada kebenaran informasi yang tercantum di dalamnya.

Rangkaian proses tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan JKK tidak berdiri sendiri pada tahap pembayaran, melainkan dimulai sejak informasi kecelakaan diterima dan status penjaminan ditetapkan. Keputusan penjaminan menjadi dasar bagi rumah sakit untuk mengajukan tagihan, sedangkan dokumen pengajuan menjadi dasar bagi petugas untuk memeriksa rincian biaya sebelum diproses lebih lanjut. Karena itu, keterkaitan antarproses perlu dijaga agar transaksi yang diproses memiliki dasar yang jelas dan dapat ditelusuri kembali.

Pentingnya pemeriksaan tersebut sejalan dengan Tangkau et al., (2023), yang menjelaskan bahwa pengelolaan kas memerlukan pengendalian internal yang memadai karena transaksi keuangan harus dikelola secara cermat untuk mengurangi risiko dan mendukung ketepatan pelaporan keuangan. Dalam Program JKK, prinsip tersebut dapat dikaitkan dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap pengajuan biaya perawatan memiliki dasar penjaminan yang jelas, didukung oleh dokumen yang sah, serta mencantumkan rincian biaya yang sesuai.

Pengelolaan dokumen juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses tersebut. Formulir permintaan pembayaran, surat jaminan, rincian tagihan, kuitansi, Formulir Taspen-3, dokumen medis pendukung, identitas peserta, dan informasi rekening rumah sakit memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam menjelaskan dasar pengajuan biaya perawatan. Oleh sebab itu, dokumen perlu diperiksa sebagai satu rangkaian, bukan hanya dihitung berdasarkan jumlah berkas yang tersedia. Pendekatan ini berkaitan dengan sistem akuntansi pengeluaran kas yang dibahas oleh Wijaya & Sukandi, (2019), yaitu bahwa dokumen dan bukti transaksi merupakan bagian dari proses administrasi pengeluaran kas. Dalam praktik pengelolaan JKK, kelengkapan dokumen perlu diikuti pemeriksaan atas kesesuaian isi dokumen dengan kasus yang dijamin.

Dari sisi pertanggungjawaban, pencatatan dan pengarsipan dokumen yang teratur dapat membantu proses penelusuran apabila diperlukan pemeriksaan ulang terhadap pengajuan tagihan. Catatan yang didukung dokumen sumber memberi dasar untuk menjelaskan alasan suatu transaksi diproses dan memudahkan identifikasi bagian yang perlu diklarifikasi. Suryaningsih & HB, (2021) membahas hubungan kepatuhan rekonsiliasi dengan validitas informasi laporan keuangan; dalam konteks JKK, relevansinya terletak pada perlunya menjaga konsistensi informasi sebelum transaksi digunakan dalam pencatatan dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan JKK dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang menghubungkan penanganan kasus, keputusan penjaminan, pemeriksaan tagihan, dan pertanggungjawaban transaksi, tanpa mengasumsikan adanya peningkatan akurasi yang telah diukur secara kuantitatif.

Berdasarkan pengamatan selama kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), pengelolaan keuangan Program JKK memerlukan keterkaitan antara dokumen pengajuan, bukti penjaminan, dan rincian biaya perawatan yang diajukan oleh rumah sakit. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar untuk menelusuri kesesuaian informasi sebelum transaksi diproses lebih lanjut. Dalam hal ini, kelengkapan administrasi tidak hanya berkaitan dengan tersedianya berkas, tetapi juga dengan kesesuaian informasi yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, pemeriksaan dokumen merupakan bagian penting dalam

mendukung keteraturan administrasi dan pertanggungjawaban transaksi keuangan Program JKK.

Proses Verifikasi Data Transaksi Keuangan Program JKK pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Surabaya

Verifikasi data transaksi keuangan pada Program JKK di PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Surabaya merupakan proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa data peserta, informasi kecelakaan kerja, dokumen penjaminan, dan rincian tagihan perawatan telah sesuai sebelum transaksi dilanjutkan ke tahap berikutnya. Verifikasi memiliki peran penting karena pengajuan biaya perawatan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan tagihan rumah sakit. Pengajuan tersebut perlu didukung oleh informasi mengenai peserta, kronologi kecelakaan, hasil pemeriksaan kelayakan penjaminan, serta bukti administrasi dan medis yang berkaitan dengan perawatan.

Tahap verifikasi dimulai ketika TASPEN menerima informasi mengenai kecelakaan kerja. Informasi dapat berasal dari sistem yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan atau dari laporan manual yang disampaikan oleh peserta, ahli waris, instansi, maupun rumah sakit. Setelah informasi diterima, TASPEN melakukan koordinasi dan investigasi untuk memeriksa kebenaran laporan serta kesesuaian data peserta. Dalam tahap ini, pemeriksaan tidak hanya diarahkan pada identitas peserta, tetapi juga pada kronologi kejadian dan hubungan antara kecelakaan yang dilaporkan dengan persyaratan penjaminan JKK. Hasil investigasi kemudian dituangkan dalam berita acara investigasi sebagai bagian dari dokumentasi pemeriksaan kasus.

Untuk mendukung hasil investigasi, diperlukan dokumen dari pihak-pihak terkait. Instansi memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian, sedangkan kepolisian memberikan laporan atau keterangan yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan apabila diperlukan. Apabila kecelakaan melibatkan kendaraan bermotor dan terdapat kemungkinan penjaminan dari Jasa Raharja, informasi mengenai penjaminan tersebut juga perlu diperhatikan. (Putri & Azizah, 2024) Dokumen dari berbagai pihak ini menjadi bahan pemeriksaan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kejadian yang dilaporkan. Oleh karena itu, verifikasi pada tahap awal JKK berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan penjaminan didasarkan pada informasi dan dokumen pendukung yang sesuai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, TASPEN menentukan apakah kasus dapat dijamin sebagai kecelakaan kerja. Jika kasus memenuhi ketentuan, surat jaminan diterbitkan untuk rumah sakit dengan tembusan kepada BPJS Kesehatan. Jika kasus tidak memenuhi ketentuan, surat tidak menjamin diterbitkan kepada rumah sakit dengan tembusan kepada BPJS Kesehatan. Keberadaan kedua jenis surat tersebut memperlihatkan bahwa hasil verifikasi memiliki konsekuensi langsung terhadap proses administrasi selanjutnya. Dengan kata lain, ketepatan pemeriksaan pada tahap awal diperlukan agar dokumen yang menjadi dasar pengajuan tagihan sesuai dengan keputusan penjaminan yang telah ditetapkan.

Verifikasi kembali diperlukan ketika rumah sakit mengajukan tagihan setelah perawatan peserta selesai. Pada tahap ini, pemeriksaan diarahkan pada kelengkapan dokumen dan kesesuaian informasi yang tercantum di dalamnya. Surat jaminan perlu dicocokkan dengan identitas peserta dan kasus yang ditangani, sedangkan rincian tagihan dan kuitansi perlu diperiksa untuk mengetahui kesesuaian biaya yang diajukan dengan dokumen pendukung. Formulir permintaan pembayaran, Formulir Taspen-3, dokumen medis, salinan KTP, dan nomor rekening rumah sakit juga perlu diperiksa sesuai fungsinya masing-masing. Pemeriksaan tersebut membantu memastikan bahwa pengajuan tagihan memiliki dasar administrasi yang

jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem akuntansi pengeluaran kas melibatkan dokumen, formulir, catatan, laporan, dan bukti pengeluaran sebagai bagian dari proses pencatatan transaksi. (Wijaya & Sukandi, 2019) Dalam proses ini, dokumen tidak sekadar menjadi persyaratan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai bukti untuk menilai kesesuaian antara keputusan penjaminan, pelayanan perawatan, dan biaya yang diajukan. Dengan demikian, verifikasi pada Program JKK di PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Surabaya perlu menekankan pemeriksaan atas keabsahan dokumen, kesesuaian data, serta keterkaitan antara setiap bukti pendukung dan transaksi yang akan diproses.

Verifikasi dokumen dalam pengajuan biaya perawatan JKK tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan berkas, tetapi juga dengan kesesuaian informasi yang tercantum di dalamnya. Identitas peserta, status penjaminan, rincian tagihan, kuitansi, dan dokumen pendukung perlu diperiksa secara berurutan agar informasi yang digunakan pada tahap berikutnya memiliki dasar administrasi yang jelas. Sistem akuntansi klaim serta sistem pengeluaran kas JKK di PT TASPEN Kantor Cabang Surabaya menunjukkan bahwa dokumen dan prosedur merupakan bagian penting dalam proses transaksi keuangan.(Tasikrede, Sondakh[2], et al., 2018) Dalam kegiatan PPL di PT TASPEN Kantor Cabang Surabaya, pemeriksaan tersebut dilakukan dengan mencocokkan dokumen pengajuan yang tersedia dan menandai berkas yang masih memerlukan kelengkapan. Oleh karena itu, verifikasi berfungsi sebagai tahap pemeriksaan administratif sebelum dokumen diteruskan sesuai alur kerja yang berlaku.

Pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis juga berkaitan dengan penerapan standar operasional prosedur dalam pengelolaan dokumen transaksi. Ketika dokumen belum lengkap atau informasi antarberkas tidak sesuai, petugas perlu melakukan pengecekan kembali sebelum proses dilanjutkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kejelasan prosedur, ketelitian saat memeriksa, dan keteraturan penyimpanan dokumen merupakan bagian yang saling mendukung dalam administrasi keuangan. Pembahasan mengenai penerapan SOP dokumen transaksi dan ketepatan pencatatan akuntansi dapat digunakan sebagai perspektif pendukung untuk memahami kebutuhan tersebut. (Asmawati & Widajantie, 2025)

Selain pemeriksaan dokumen satu per satu, verifikasi juga perlu memperhatikan keterkaitan informasi antardokumen. Identitas peserta, informasi kasus kecelakaan, surat jaminan, rincian biaya perawatan, kuitansi, serta dokumen pendukung perlu dibaca sebagai satu rangkaian informasi. Pemeriksaan tersebut membantu petugas menelusuri apakah tagihan yang diajukan berkaitan dengan kasus yang dijamin dan apakah nominal yang tercantum didukung oleh bukti yang tersedia. Apabila ditemukan data yang belum lengkap atau berbeda, dokumen tersebut perlu diteliti kembali dan diklarifikasi kepada pihak terkait sesuai prosedur yang berlaku. (Grissela & Haryati, 2026)

Berdasarkan kegiatan pengamatan dan praktik langsung selama PPL, verifikasi data transaksi keuangan dapat dipahami melalui pemeriksaan dokumen pengajuan biaya perawatan JKK yang tersedia. Pemeriksaan tersebut mencakup formulir permintaan pembayaran, surat jaminan, rincian tagihan, kuitansi, Formulir Taspen-3, dokumen medis pendukung, identitas peserta, dan informasi rekening rumah sakit. Setiap dokumen perlu diperhatikan sesuai dengan fungsinya agar informasi yang digunakan dalam proses administrasi memiliki dasar yang jelas. Dengan demikian, pelaksanaan verifikasi tidak hanya berorientasi pada kelengkapan berkas, tetapi juga pada kesesuaian informasi yang saling berkaitan.

Verifikasi juga berkaitan erat dengan rekonsiliasi, tetapi keduanya memiliki penekanan yang berbeda. Verifikasi dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pengajuan,

sedangkan rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan informasi yang saling berkaitan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan data atau nominal. Kedua proses tersebut membantu petugas menelusuri informasi transaksi berdasarkan dokumen yang tersedia. Dalam pengelolaan keuangan, pengendalian internal dan rekonsiliasi menjadi bagian penting untuk menjaga konsistensi informasi serta menindaklanjuti selisih yang ditemukan. (Hamidah & Priono, 2026)

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa verifikasi JKK memiliki dua fokus yang saling berkaitan. Fokus pertama adalah pemeriksaan kelayakan penjaminan berdasarkan informasi kecelakaan kerja dan dokumen hasil investigasi. Fokus kedua adalah pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen tagihan setelah perawatan selesai. Kedua fokus tersebut diperlukan agar proses administrasi dan pengelolaan keuangan tidak terlepas dari dasar penjaminan yang telah ditetapkan. Semakin teliti pemeriksaan dilakukan, semakin mudah pula menelusuri dasar pengajuan tagihan apabila ditemukan perbedaan informasi atau diperlukan klarifikasi lebih lanjut.

Dalam pelaksanaannya, transaksi pengeluaran kas pada PT TASPEN Kantor Cabang Surabaya berkaitan dengan proses otorisasi oleh pihak yang berwenang, dimana setiap transaksi perlu diketahui dan mendapatkan persetujuan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku. Sistem pengendalian intern diterapkan untuk memastikan aktivitas perusahaan berjala secara efektif dan konsisten. Verifikasi data juga berkaitan dengan proses pembayaran manfaat kepada peserta. Dalam pengajuan data yang menggunakan sistem TOS (*Taspen Online Service*) menunjukkan adanya pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan data peserta. Proses tersebut dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk melihat penerapan prosedur pengajuan data pensiun.

Secara umum, verifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen, kesesuaian identitas atau kode transaksi, tanggal, nominal, serta persetujuan dari pejabat yang berwenang. Apabila ditemukan informasi yang belum lengkap atau tidak sesuai, data tersebut perlu diteliti kembali sebelum diteruskan ke tahap pencatatan atau pembayaran. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko kesalahan input dan memastikan transaksi memiliki dasar dokumentasi yang memadai.

Pemanfaatan sistem seperti SAP dan TOS membantu penyimpanan serta pengolahan informasi secara digital, tetapi hasil yang diperoleh tetap bergantung pada kualitas data yang dimasukkan dan pelaksanaan prosedur pemeriksaan. Oleh karena itu, petugas perlu memastikan bahwa data pada sistem sesuai dengan dokumen pendukung dan mengikuti ketentuan otorisasi yang berlaku. Catatan atas koreksi atau kekurangan dokumen juga dapat membantu proses tindak lanjut serta memudahkan penelusuran apabila terjadi perbedaan.

Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa verifikasi memiliki peran dalam memastikan kesiapan dokumen sebelum diteruskan ke tahap administrasi berikutnya. Pemeriksaan identitas peserta dan status penjaminan berkaitan dengan kejelasan dasar pengajuan, sedangkan pemeriksaan rincian tagihan dan kuitansi berkaitan dengan kesesuaian biaya yang diajukan. Meskipun demikian, pengamatan yang dilakukan belum dapat digunakan untuk menyimpulkan besarnya pengaruh verifikasi terhadap tingkat kesalahan pencatatan keuangan. Oleh sebab itu, hasil pembahasan lebih menekankan pada pelaksanaan prosedur pemeriksaan dan perannya dalam mendukung ketertiban administrasi transaksi JKK.

Proses Rekonsiliasi Data Transaksi Keuangan Program JKK pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Surabaya.

Proses rekonsiliasi data transaksi keuangan pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Surabaya dilakukan dengan membandingkan kesesuaian data yang tercantum dalam dokumen pengajuan klaim dengan bukti transaksi keuangan yang digunakan sebagai dasar pencatatan. Data yang diperiksa meliputi identitas peserta, informasi kecelakaan kerja, surat jaminan, rincian biaya pengobatan, bukti pembayaran, serta tagihan dari pihak rumah sakit. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dicatat telah sesuai dengan dokumen pendukung dan berkaitan dengan kasus jaminan kecelakaan kerja yang diajukan. Proses pemeriksaan identitas peserta, informasi kecelakaan, dokumen jaminan, serta tagihan rumah sakit merupakan bagian penting dalam prosedur pengajuan klaim JKK di lingkungan PT TASPEN (Kariasa et al., 2021).

Dalam pelaksanaan rekonsiliasi, pencocokan informasi perlu memperhatikan hubungan antara dokumen pengajuan biaya perawatan dan bukti transaksi yang menjadi dasar administrasi keuangan. Informasi mengenai identitas peserta, status penjaminan, rincian tagihan, dan bukti pembayaran tidak dapat diperiksa secara terpisah karena setiap informasi memiliki keterkaitan dengan transaksi yang diajukan. Pencocokan tersebut diperlukan untuk menelusuri kesesuaian informasi antardokumen serta mengidentifikasi bagian yang masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian, rekonsiliasi memiliki fungsi yang berbeda dari verifikasi, meskipun keduanya saling mendukung dalam proses pengelolaan transaksi keuangan Program JKK

Dalam pelaksanaannya, proses rekonsiliasi dapat menemukan perbedaan antara informasi yang tercantum dalam dokumen pengajuan dengan data transaksi yang akan dicatat. Perbedaan tersebut dapat berupa ketidaksesuaian identitas peserta, nominal tagihan, rincian biaya pelayanan kesehatan, maupun bukti pembayaran yang belum lengkap. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, petugas perlu menelusuri kembali sumber dokumen yang digunakan untuk memastikan penyebab perbedaan tersebut. Setiap penyesuaian data harus didasarkan pada dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pencatatan keuangan (Zahra & Aisyah, 2024).

Hasil rekonsiliasi selanjutnya perlu didokumentasikan sebagai bahan pemeriksaan dan pengendalian transaksi keuangan. Dokumentasi tersebut dapat memuat jenis ketidaksesuaian yang ditemukan, dokumen yang diperiksa, pihak yang berkaitan dengan transaksi, serta tindakan penyelesaian yang telah dilakukan. Pencatatan hasil rekonsiliasi secara sistematis dapat membantu petugas melakukan penelusuran apabila ditemukan perbedaan data pada pemeriksaan berikutnya. Dokumentasi yang jelas juga dapat menjadi bukti bahwa proses pemeriksaan dan penyelesaian perbedaan telah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku (Subekan & Widodo, 2026).

Selain pemeriksaan dokumen transaksi, ketepatan pencatatan keuangan juga berkaitan dengan kejelasan pembagian tugas, prosedur pembayaran, pencatatan administrasi, dan pengawasan dalam pelaksanaan program jaminan sosial. Setiap tahapan tersebut perlu berjalan secara terkoordinasi agar informasi yang diterima, diproses, dan dicatat oleh petugas memiliki kesesuaian. Pelaksanaan prosedur administrasi dan pengawasan yang terarah dapat mendukung keteraturan pengelolaan pembayaran manfaat serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses pencatatan (Syafridayani et al., 2025).

Pelaksanaan Program JKK juga merupakan bagian dari penyelenggaraan perlindungan jaminan

sosial bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Perlindungan tersebut memiliki dasar hukum yang mengatur hak peserta dalam memperoleh jaminan ketika mengalami kecelakaan kerja. Dengan demikian, pengelolaan administrasi dan transaksi keuangan program perlu dilaksanakan secara tertib agar hak peserta dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Tasikrede, Sondakh, et al., 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, rekonsiliasi data transaksi keuangan pada Program JKK tidak hanya berfokus pada pencocokan nominal transaksi, tetapi juga memperhatikan keterkaitan antara identitas peserta, status jaminan, dokumen pelayanan kesehatan, rincian tagihan, dan bukti pembayaran. Seluruh informasi tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh sebelum digunakan sebagai dasar pencatatan dan pelaporan keuangan. Dengan demikian, proses rekonsiliasi dapat membantu meningkatkan ketepatan informasi keuangan serta mendukung tersedianya data transaksi yang lebih tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian proses tersebut, hasil rekonsiliasi seharusnya menjadi dasar untuk menentukan apakah informasi yang diperiksa telah sesuai atau masih memerlukan klarifikasi. Apabila ditemukan perbedaan, penelusuran perlu dilakukan dengan mengacu pada dokumen sumber yang relevan sebelum penyesuaian data dilaksanakan. Namun, berdasarkan ruang lingkup pengamatan yang tersedia, penelitian ini belum mengukur jumlah selisih transaksi yang ditemukan maupun tingkat perubahan akurasi pencatatan setelah rekonsiliasi dilakukan. Oleh karena itu, manfaat rekonsiliasi dalam penelitian ini dijelaskan berdasarkan fungsi proseduralnya, yaitu membantu pemeriksaan konsistensi data dan menyediakan dasar penelusuran transaksi.

Kendala dan Upaya Penyelesaian dalam Verifikasi dan Rekonsiliasi Program JKK

Pelaksanaan verifikasi dan rekonsiliasi data transaksi keuangan Program JKK membutuhkan ketelitian karena prosesnya melibatkan beberapa tahapan administrasi dan pihak yang berkaitan. Tahapan tersebut dimulai dari penerimaan informasi kecelakaan kerja, pemeriksaan identitas peserta, pengecekan dokumen pengajuan, hingga pemeriksaan tagihan pelayanan kesehatan dari rumah sakit. Setiap tahapan membutuhkan dokumen pendukung yang sesuai agar proses pengajuan dan pembayaran jaminan dapat dilaksanakan berdasarkan informasi yang benar. Pemeriksaan data peserta, konfirmasi informasi kecelakaan, serta pengecekan tagihan rumah sakit merupakan bagian dari prosedur pengajuan klaim JKK di PT TASPEN (Kariasa et al., 2021).

Salah satu kendala yang berpotensi muncul dalam proses verifikasi adalah ketidaklengkapan dokumen administrasi yang disampaikan oleh pihak terkait. Selain itu, perbedaan informasi antara satu dokumen dengan dokumen lainnya juga dapat menghambat proses pemeriksaan, terutama apabila terdapat ketidaksesuaian identitas peserta, rincian biaya pelayanan kesehatan, atau nominal tagihan. Kondisi tersebut membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut agar petugas tidak langsung melakukan pencatatan terhadap data yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Kelengkapan dokumen administrasi dan ketepatan prosedur pelayanan merupakan aspek penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial di lingkungan PT TASPEN (Sya'aran & Rusnan, 2025).

Ketidaklengkapan dokumen dan ketidaksesuaian informasi perlu dibedakan sebagai bentuk kendala yang mungkin terjadi dalam proses administrasi dengan kendala yang benar-benar ditemukan selama pengamatan. Dalam pemeriksaan dokumen transaksi JKK, kedua kondisi tersebut dapat menjadi

alasan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut sebelum berkas diteruskan ke tahap berikutnya. Akan tetapi, penelitian ini tidak memiliki data terperinci mengenai frekuensi kejadian, jumlah dokumen yang bermasalah, maupun besarnya dampak kendala terhadap waktu penyelesaian transaksi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kendala dibatasi pada aspek administrasi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan verifikasi dan rekonsiliasi, tanpa menyatakan bahwa seluruh kendala tersebut telah terjadi di PT TASPEN Kantor Cabang Surabaya.

Upaya penyelesaian terhadap kendala tersebut dapat dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen sejak tahap awal penerimaan berkas. Dokumen yang perlu diperiksa meliputi surat permohonan pembayaran, surat jaminan, rincian tagihan pelayanan kesehatan, kuitansi atau bukti pembayaran, formulir Taspen-3, dokumen medis, kartu identitas peserta, serta rekening tagihan dari rumah sakit. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang diterima telah sesuai dengan persyaratan administrasi dan dapat digunakan sebagai dasar verifikasi transaksi. Kelengkapan dokumen pendukung menjadi salah satu faktor yang menentukan kelancaran proses pemeriksaan dan penyelesaian pengajuan klaim JKK (Kariasa et al., 2021).

Apabila ditemukan perbedaan informasi atau nominal transaksi, petugas perlu melakukan pencocokan kembali dengan dokumen sumber yang berkaitan. Proses tersebut dapat dilakukan dengan menandai bagian dokumen yang tidak sesuai, memeriksa bukti transaksi, serta melakukan konfirmasi kepada pihak yang memiliki informasi terkait. Hasil klarifikasi perlu dicatat agar alasan terjadinya perbedaan dan tindakan penyelesaiannya dapat diketahui secara jelas. Langkah tersebut juga perlu didukung dengan pelaksanaan administrasi yang tertib agar pemenuhan hak peserta dalam program jaminan sosial dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku (Rakhmawati et al., 2016).

Selain pemeriksaan dokumen, koordinasi antara petugas PT TASPEN dengan peserta atau ahli waris, instansi asal peserta, pihak rumah sakit, dan pihak terkait lainnya juga diperlukan untuk mempercepat penyelesaian ketidaksesuaian data. Komunikasi yang baik dapat membantu memperjelas informasi yang belum lengkap serta mengurangi kesalahpahaman dalam penyampaian dokumen administrasi. Koordinasi dengan instansi terkait dan penyampaian informasi yang terarah merupakan bagian dari strategi komunikasi dalam pelaksanaan sosialisasi program JKK di lingkungan PT TASPEN (Alfarizi et al., n.d.).

Dengan demikian, penyelesaian kendala dalam proses verifikasi dan rekonsiliasi perlu dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen, pencocokan informasi, konfirmasi kepada pihak terkait, serta pendokumentasian hasil pemeriksaan. Setiap perbedaan data harus ditindaklanjuti sebelum transaksi digunakan sebagai dasar pencatatan dan pelaporan keuangan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung ketepatan pencatatan transaksi Program JKK, meningkatkan keteraturan administrasi, dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai tindak lanjut, pemeriksaan ulang terhadap dokumen sumber, pencocokan informasi antardokumen, dan konfirmasi kepada pihak terkait dapat digunakan untuk memperjelas data yang belum sesuai. Hasil klarifikasi juga perlu didokumentasikan agar dasar penyelesaian perbedaan dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Langkah-langkah tersebut merupakan rekomendasi prosedural yang relevan dengan proses verifikasi dan rekonsiliasi yang dibahas dalam penelitian ini. Pelaksanaannya tetap perlu disesuaikan dengan prosedur operasional dan kewenangan petugas yang berlaku di PT TASPEN Kantor Cabang Surabaya. Dengan demikian, rekomendasi yang diberikan berfokus pada penguatan ketertiban administrasi dan keterlacakan transaksi, bukan pada klaim peningkatan akurasi yang belum diukur secara

langsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan transaksi keuangan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Surabaya dilaksanakan melalui rangkaian proses yang saling berkaitan, mulai dari penetapan status penjaminan hingga pemeriksaan dokumen tagihan biaya perawatan. Verifikasi dilakukan dengan memeriksa identitas peserta, informasi kecelakaan kerja, status penjaminan, kelengkapan dokumen, dan kesesuaian rincian tagihan rumah sakit. Sementara itu, rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan informasi antardokumen dan bukti transaksi untuk menelusuri kemungkinan perbedaan data atau nominal sebelum transaksi diproses lebih lanjut.

Dalam pelaksanaannya, ketidaklengkapan dokumen dan ketidaksesuaian informasi merupakan kendala yang perlu diantisipasi dalam proses verifikasi dan rekonsiliasi. Upaya penanganannya dapat dilakukan melalui pemeriksaan ulang dokumen sumber, pencocokan informasi, konfirmasi kepada pihak terkait, serta pencatatan hasil klarifikasi sesuai prosedur yang berlaku. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis berupa bahan evaluasi bagi PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Surabaya untuk mendukung ketelitian pemeriksaan, keteraturan administrasi, dan ketertelusuran transaksi keuangan Program JKK. Namun, penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif perubahan tingkat akurasi pencatatan maupun frekuensi terjadinya ketidaksesuaian data.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarizi, F., Sutarjo, M., & Wihayati, W. (n.d.). Strategi Komunikasi dalam Sosialisasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Cirebon. *Jurnal Signal Unswagati Cirebon*, 1–13.

Asmawati, T. R., & Widajantie, T. D. (2025). Evaluasi Implementasi Standar Operasional Prosedur Dokumen Transaksi Terhadap Keakuratan Pencatatan Akuntansi: Studi Kasus pada PT BUU. *Journal of Accounting and Digital Finance*, *5*(3), 329–344. https://doi.org/https://doi.org/10/53088/jadfi.v5i3.2157

Chamalinda, D. P., & Leapatra, H. K. N. (2026). Implementasi Rekonsiliasi Data Transaksi Menggunakan Software Accurate Dalam Mendukung Pengelolaan Data Perusahaan Klien Pada Pt Xyz. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gorontalo*, *8*(2), 928–940.

Grissela, A., & Haryati, T. (2026). Analisis Ketidaklengkapan dan Ktidaksesuaian Dokumen Pendukung pada Proses Direct Payment Tagihan Operasional PT XYZ. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, *6*(03), 70–80. https://doi.org/https://doi.org/10.69957/grjb.v6i03.2951

Hamidah, S. R., & Priono, H. (2026). Peran Pegendalian Internal dalam Proses Rekonsiliasi Dokumen Keuangan Untuk Menjaga Keakuratan Data pada PT XYZ. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Akuntans (Jebisma)*, *4*(1), 35–46. https://doi.org/https://doi.org/10.70197/jebisma.v4i1.246

Kariasa, I. G., Rumini, N. I., & Putrana, I. W. (2021). Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar. *Seminar Nasional Riset Linguistik Dan Pengajaran Bahasa (SENARILIP V)*, 164–166. http://ojs.pnb.ac.id/index.php/Proceedings/

Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi penelitian: Pedoman penulisan karya tulis ilmiah (KTI)*. Deepublish.

Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Saputra, D. N., Mardianto, D., Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Amruddin, Alam, M. D. S., Lisya, M., & Ahyar, D. B. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (F. Sukmawati (ed.)). Grup Penerbitan CV. Pradina Pustaka Grup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pub. L. No. 70 (2015).

Putri, M. W., & Azizah, N. (2024). Sistem Tata Kelola Tagihan Pembayaran Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Karimunjawa. *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, *2*(4), 135–143. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/maeswara.v214.1085

Rakhmawati, M. A., Njatrijani, R., & Saptono, H. (2016). Tanggung Jawab PT Taspen (Persero) terhadap Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara. *Diponegoro Law Review*, *5*(2), 1–11. http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/%0ATANGGUNG

Subekan, A., & Widodo, R. (2026). Tinjauan Mekanisme dan Praktik Pengelolaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pegawai oleh Bendahara Umum Negara. *Amanah: Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik*, *2*(1), 28–62.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suryaningsih, M., & HB, A. S. (2021). Pengaruh Kepatuhan Rekonsiliasi Dan Akurasi Informasi Pendapatan Belanja Terhadap Validitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, *10*(2), 339–354.

Sya'aran, A., & Rusnan, H. (2025). Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Terkait Asuransi Kesehatan dan Program Kesjahteraan dan Program Kesejahteraan Serta Jaminan Sosial Bagi ASN di PT. Taspen Kota Mataram. *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram*, *1*(1), 1–10. https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

Syafridayani, Pawerangi, S., & Nurhikmah. (2025). Audit Manajemen Atas Pembayaran Program Pensiun pada PT Taspen (Persero) Cabang Borneo. *Economics and Digital Business Review*, *7*(1), 282–395. https://doi.org/https://doi.org/10.37531/ecotal.v7i1.3136

Tangkau, jaqueline E. M., Lontah, M., & Mokoagow, N. R. (2023). Analisis Pengendalian Intern Penrimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado. *JAR: Jambura Accounting Review*, *4*(2), 224–235. https://doi.org/https://doi.org/10.37905/jar.v4i2.84

Tasikrede, C. C., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2018). Analisis Sistem Akuntansi Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Bagi Aparatur Sipil Negara pada PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Kantor Cabang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, *13*(3), 419–427.

Wijaya, E. P., & Sukandi. (2019a). Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada PT. Taspen (Studi pada PT. Taspen (persero) Kantor Cabang Utama Surabaya). *Publikasi Ilmiah Akuntansi*, *1*(1), 1479–1089.

Zahra, V. A., & Aisyah, M. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembayaran Dana Pensiun pada PT XYZ (Persero) Cabang Yogyakarta. *Jurnal Rimba Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, *2*(2), 300–311. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/rimba.v2i2.776